

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang mempunyai tujuan tertentu dalam menjalankan usahanya. Setiap perusahaan ingin dapat memenuhi kepentingan para anggota maupun pemegang sahamnya. Menurut Sawyer (2009:8), terdapat perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah yang ikut meramaikan persaingan usaha di bumi pertiwi ini. Dengan perusahaan yang selalu berkembang, manajemen tidak bisa mengawasi secara langsung kinerja perusahaan apakah sudah berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis. Salah satu profesi yang dapat diberdayakan oleh manajemen untuk melakukan fungsi pengawasan ini adalah Auditor Internal.

Di dalam melaksanakan kegiatan, tidak bisa dipungkiri jika dalam suatu perusahaan akan terjadi tindakan kecurangan (*fraud*). Kecurangan (*fraud*) merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ada di dalam organisasi untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri atau sekelompok golongan tertentu. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Widjaja (2012:1) yang mengidentifikasikan *fraud* sebagai suatu pengertian umum dan mencakup beragam cara yang dapat digunakan oleh kecerdikan manusia, yang digunakan dengan cara kekerasan oleh seseorang, untuk mendapatkan suatu keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar.

Namun, kecurangan (*fraud*) dapat diminimalisir dengan adanya upaya pencegahan kecurangan dari perusahaan. Pencegahan kecurangan adalah suatu sistem dan prosedur yang dirancang dan dilaksanakan secara khusus untuk mencapai tujuan utama, bukan satu-satunya tujuan untuk mencegah dan menghalangi (dapat membuat jera) terjadinya *fraud*. Salah satu cara untuk mencegah *fraud* adalah melalui audit internal. Menurut Soekrisno Agoes (2012:204), audit internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *governance*. Sedangkan Menurut Widjaja (2012:65), audit internal memainkan peranan penting dalam memantau aktivitas untuk memastikan bahwa program dan pencegahan *fraud* telah berjalan efektif. Aktivitas audit internal ini dapat mencegah dan mengatasi terjadinya *fraud*.

Di Indonesia, pembentukan fungsi audit internal merupakan keharusan bagi BUMN (Badan Usaha Milik Negara), bank, dan lembaga pemerintah. Perusahaan publik (Tbk.) wajib membentuk komite audit agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Selain itu, komite audit juga memerlukan fungsi audit internal (Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004:3).

Selain auditor internal, *whistleblowing system* juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Dengan adanya penyelenggaraan *whistleblowing system*, maka akan timbul keengganan untuk

melakukan pelanggaran dan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena semakin meningkatnya kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif untuk mencegah kecurangan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*. 2008:2).

*Whistleblowing system* adalah suatu sistem pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan (Semendawai dkk. 2011:19). Seorang karyawan perusahaan tidak hanya berperan sebagai pekerja di perusahaan, tetapi dapat juga berperan sebagai pencegah dan pendeteksi kecurangan dengan cara melaporkan kejanggalaan atau masalah yang terjadi di perusahaannya. Pelaporan ini dapat dilakukan secara langsung ke pihak perusahaan tanpa harus menyebutkan namanya. Namun, banyak juga karyawan yang tidak berani menyampaikan untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Jika hal tersebut terjadi, maka dapat dilakukan melalui cara lain, yaitu melalui penerapan *whistleblowing system* yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Dalam rangka melakukan pengawasan internal, perusahaan dapat berinisiatif membuat sebuah *whistleblowing system*. Sistem ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan di internal perusahaan. Sistem ini disediakan agar para karyawan atau orang di luar perusahaan dapat melaporkan kejahatan yang terjadi di internal perusahaan. Pembuatan *whistleblowing system* ini bertujuan untuk mencegah kerugian yang diderita perusahaan, serta untuk menyelamatkan usaha mereka. Sistem yang dibangun ini kemudian disesuaikan ke dalam aturan perusahaan masing-masing,

sehingga diharapkan sistem ini akan memberikan manfaat bagi peningkatan pelaksanaan *corporate governance* (Semendawai, dkk. 2011:69).

Dalam suatu organisasi atau perusahaan sektor publik tidak dapat lepas dari adanya kecurangan. Dalam rangka pencegahan kecurangan, perusahaan BUMN membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) yang diharapkan mampu mengurangi dan mencegah tindakan kecurangan dalam perusahaan. Namun, dalam realitanya masih terdapat kelemahan pada praktek pencegahan kecurangan tersebut. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme masih marak terjadi di perusahaan-perusahaan BUMN yang disebabkan kelemahan dari SPI di perusahaan. Dalam hal ini yang dirugikan bukan hanya perusahaan BUMN itu sendiri tetapi pemerintah juga dikarenakan kepemilikan saham sebagian dimiliki oleh pemerintah. Sepertinya halnya fenomena kasus dugaan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme pada penyewaan menara BTS Telkom di Tahun 2014. Permasalahan ini terkait pembelian 13,7% saham PT. Tower Bersama Infrastruktur Tbk dengan nilai 11,065 Triliun. Yudi Samara, selaku praktisi intelijen bisnis menduga adanya praktek KKN pada transaksi tersebut dan mendesak BPK dan KPK segera menginvestigasi kasus tersebut. ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id))

Fenomena di atas berkaitan dengan dimensi Ciptakan Iklim yang Jujur, Keterbukaan, dan Saling Membantu yaitu kurang efektifnya implementasi program pencegahan kecurangan.

Fenomena selanjutnya mengenai lemahnya kinerja auditor internal di dalam suatu perusahaan yang sejatinya mereka memiliki eksistensi dalam menjalankan fungsi dari audit internalnya. Dampaknya, kualitas rekomendasi

yang menurun. Hal ini dikemukakan dari hasil temuan LHP BPK RI Semester II Tahun 2014 mengungkapkan terdapat 601 kasus kelemahan Satuan Pengawas Internal (SPI) dan kelemahan administrasi yang memerlukan perbaikan dalam tubuh SPI. BPK telah memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja di setiap BUMN yang diperiksa dan dari permasalahan finansial senilai Rp. 325,77 miliar diantaranya telah dikembalikan ke kas negara oleh entitas. (LHP BPK Semester II Tahun 2014)

Fenomena di atas berkaitan dengan dimensi Kemampuan Profesional karena masih lemahnya auditor internal dalam SPI perusahaan BUMN.

Fenomena selanjutnya mengenai *Whistleblowing* yaitu pengungkapan kasus kecurangan/*whistleblowing* yang dilakukan oleh Ferry M Pasaribu yang merupakan seorang *General Manajer* Divisi Sistem Manajemen dan Informasi Teknologi PT. Sarinah (Persero). Ferry terhitung sudah tiga kali melaporkan dugaan korupsi di tempatnya bekerja, PT.Sarinah (Persero). *Whistleblowing* yang pertama yaitu kasus dugaan korupsi pada saat direksi periode 1996-2001 tapi tidak diproses oleh Kejaksaan Agung pada saat itu. Tetapi, kemudian direksi yang bersangkutan dijerat kembali pada kasus yang Ferry laporkan selanjutnya pada Tahun 2007. Pelaporan Ferry yang kedua ini mengenai adanya dugaan kecurangan kerja sama dengan PT. Graha Sari Pacific. Atas kasus tersebut Direktur Utama divonis 6 Tahun, sedangkan Direktur Keuangan divonis 5 Tahun. Pelaporan yang ketiga adalah diduga adanya kecurangan pada saat pembelian singkong kering dari PT Bumi Cassava. Kerugian negara yang ditaksir atas kerjasama tersebut adalah sebesar Rp 4,4 Miliar. Atas kasus ini Manager Divisi Perdagangan PT.

Sarinah (Persero) dan Direktur Utama PT. Bumi Cassava ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 6 April 2015. (KBR, 17 September 2015)

Fenomena di atas berkaitan dengan dimensi Aspek Struktural yaitu berkomitmen untuk melaporkan setiap menemukan adanya pelanggaran.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Rizky Ramdani (2018) dengan judul Pengaruh Audit Internal dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan pada PT. PLN di Kota Bandung tetapi dengan perbedaan sampel pada penelitian ini adalah auditor internal pada 3 BUMN di Kota Bandung.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH FUNGSI AUDIT INTERNAL DAN PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*) (Survey Pada PT. Pindad (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. INTI (Persero))”**

## **1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih terdapatnya kondisi yang menunjukkan lemahnya auditor internal pada SPI di perusahaan BUMN
2. Kurang efektifnya implementasi pencegahan kecurangan

3. Masih terdapatnya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang berdampak negatif pada perusahaan

### 1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi audit internal pada 3 BUMN di Kota Bandung
2. Bagaimana penerapan *whistleblowing system* pada 3 BUMN di Kota Bandung
3. Bagaimana efektivitas pencegahan kecurangan (*fraud*) pada 3 BUMN di Kota Bandung
4. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan fungsi audit internal terhadap efektivitas pencegahan kecurangan (*fraud*) pada 3 BUMN di Kota Bandung
5. Seberapa besar pengaruh penerapan *whistleblowing system* terhadap efektivitas pencegahan kecurangan (*fraud*) pada 3 BUMN di Kota Bandung
6. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan fungsi audit internal dan penerapan *whistleblowing system* secara simultan terhadap efektivitas pencegahan kecurangan (*fraud*) pada 3 BUMN di Kota Bandung

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi audit internal pada 3 BUMN di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui penerapan *whistleblowing system* pada 3 BUMN di Kota Bandung
3. Untuk mengetahui efektivitas pencegahan kecurangan (*fraud*) pada 3 BUMN di Kota Bandung
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan fungsi audit internal terhadap efektivitas pencegahan kecurangan (*fraud*) pada 3 BUMN di Kota Bandung
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan *whistleblowing system* terhadap efektivitas pencegahan kecurangan (*fraud*) pada 3 BUMN di Kota Bandung
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan fungsi audit internal dan penerapan *whistleblowing system* secara simultan terhadap efektivitas pencegahan kecurangan (*fraud*) pada 3 BUMN di Kota Bandung

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut.

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi, khususnya pada bahasan audit.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian disajikan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi penulis mengenai pelaksanaan fungsi audit internal, penerapan *whistleblowing system* dan efektivitas pencegahan kecurangan (*fraud*).

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi, hingga dapat membantu perusahaan untuk membuat kebijakan mengenai upaya dalam melakukan pencegahan kecurangan (*fraud*).

3. Bagi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan juga dapat dijadikan sebagai alat pertimbangan, acuan, dan referensi

untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, khususnya yang berkaitan dengan masalah ini.

### **1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada 3 BUMN di Kota Bandung. Adapun penelitian dilaksanakan pada bulan November sampai dengan selesai untuk mendapatkan data-data tertulis dan informasi lainnya sebagai bahan penyusunan skripsi.